

Anggaran Bantuan Hukum Pemkot Minim

Usulkan Yusril Ihza Jadi Lawyer Pemkot

BALAI KOTA - Pemkot Semarang dinilai tak serius dalam memberikan pendampingan hukum terhadap kasus-kasus yang melibatkan pemkot dengan pihak ketiga. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kasus raibnya deposito kas daerah (kasda) sebesar Rp 22,7 miliar dan kasus sewa lahan SPBU Pandanaran yang hingga kini tak kunjung selesai.

Penilaian itu dilontarkan anggota Pansus DPRD Kota Semarang Ari Purbono menyikapi masalah hukum yang kerap menimpa pemkot dengan pihak ketiga. Apalagi selama ini dalam penganggaran, dana bantuan hukum pemkot terbilang masih sangat minim.

"Secara hukum, kami melihat langkah-langkah pemerintah belum serius. Kita ini mau menang apa tidak. Dalam kasus ini (hilangnya deposito kasda Rp 22,7 M), kalau kita mau serius,

▶ Baca *Anggaran ...* hal 11

Anggaran Bantuan Hukum di Bawah Rp 200 Juta

■ ANGGARAN

Sambungan dari hal. 1

kita harus mencari advokat yang andal untuk membela kita. Saya usulkan Yusril (Yusril Ihza Mahendra)," katanya kemarin.

Menurut legislator dari PKS ini, jika memang serius, maka pemkot harus menganggarkan dana bantuan hukum yang besar. Karena pengacara-pengacara kondang sekelas Yusril, butuh dana tinggi. "Kalau mau serius ya kita sepakati lawyer seperti Yusril. Rekomendasinya kita akan menyediakan anggaran besar untuk pendampingan-pendampingan kasus besar seperti hilangnya kasda Rp 22,7 M ini," ujarnya.

Ari membeber, selama ini anggaran pemkot untuk pembelaan hukum hanya sekitar Rp 200 juta. Dengan nilai sekecil itu, tidak cukup untuk memenangkan perkara. Apalagi menghadapi permasalahan-permasalahan

hukum yang besar. "Kalau mau serius anggaran ya harus besar. Dan kalau memang tahun ini kasusnya belum selesai, kita akan bela dengan kapasitas (*lawyer*) seperti Yusril," tandasnya.

Selain itu, Ari juga menyinggung kasus kerja sama sewa lahan antara pemkot dengan pihak SPBU Pandanaran yang sampai sekarang belum *clear*. "Coba kita lihat kasus SPBU Pandanaran itu sampai sekarang juga belum selesai *kan*," katanya.

"BPK menyatakan selama tidak memiliki kekuatan dan kepastian hukum, kita akan WDP (wajar dengan pengecualian) terus atau bahkan akan turun," tandasnya.

Seperti diketahui, hilangnya deposito kasda senilai Rp 22,7 miliar tersebut membuat BPK memberikan penilaian wajar dengan pengecualian kepada Pemkot Semarang. "Sekali lagi kalau mau serius ya kita tambah anggaran (bantuan hukum). Biar

ini menjadi pembelajaran kabupaten/kota yang lain," tandasnya.

"Menanggapi hal tersebut, Kabag Hukum Setda Kota Semarang Abdul Haris mengatakan, pihaknya akan mengusulkan rekomendasi dewan tersebut ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Diakuinya, selama ini anggaran pendampingan hukum memang sangat kecil. Yakni, per satu tahun anggarannya di bawah Rp 200 juta. Dana tersebut disesuaikan dengan *lawyer* yang ada di Kota Semarang.

"Kita tidak berani terlalu tinggi, karena nama-nama *lawyer* yang ada di sini memang tidak terlalu tinggi. Kalau sekelas Yusril memang butuh anggaran besar," terangnya.

Pihaknya sepakat dengan rekomendasi dewan yang mengusulkan nama *lawyer* sekelas Yusril. "Semakin kita gunakan *lawyer* yang lebih *qualified* asalkan didukung dana, kita sepakat," katanya. (zal/aro/ce1)